BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Dewasa ini Hubungan Internasional merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh. Jika kita mengatakan sesuatu yang sedang tumbuh, maka ini menunjukan suatu hal yang ada dalam satu proses. Proses ini mengandung arti sedang berkembang dan sekaligus menunjukan bahwa bentuk finalnya belum tercapai. Sebagai suatu konsep, Hubungan Internasional sering didefinisikan sebagai aktivitas manusia dimana individu dan kelompok dari satu negara berinteraksi secara resmi ataupun tidak resmi dengan individu atau kelompok dari negara lain.

> " Hubungan Internasional tidak hanya melibatkan kontak fisik secara langsung, tetapi juga transaksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer dan diplomasi, baik secara publik ataupun pribadi. Studi Hubungan Internasional ditunjukan oleh aktivitas-aktivitas yang beragam, seperti perang, bantuan kemanusiaan, perdagangan dan investasi internasional, pariwisata bahkan olimpiade (Lopez dan Stohl, 1989:3) ".

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antara aktor suatu negara dengan negara lainnya. Pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya hubungan antar negara saja, tetapi juga hubungan antar individu dengan kelompok kepentingan sehingga negara tidak selalu menjadi aktor utama tetapi merupakan aktor yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara.

Dalam interaksi tersebut sering timbul berbagai masalah, oleh karena itu maka hubungan internasional perlu untuk dipahami dan dipecahkan dalam bentuk studi. Studi Hubungan Internasional itu sendiri dengan demikian merupakan suatu studi tentang interaksi yang terjadi diantara negara-negara yang berdaulat di dunia atau merupakan suatu studi tentang para pelaku bukan negara atau *non-state* aktor yang perilakunya mempunyai pengaruh dalam kehidupan negara berbangsa.

Hubungan antara Indonesia dengan negara super power Amerika Serikat merupakan salah satu contoh dari sekian banyak fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional. Aktor hubungan internasional bisa saja merupakan aktor negara atau juga aktor non-negara, seperti yang diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional:*

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (2005: 4).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis, yang menjadi penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Hubungan-hubugan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar dalam hubungan internasional, hal ini dapat dipertegas dengan melihat definisi dari hubungan internasional, yakni hubungan internasional mengacu pada semua bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang berlainan baik disponsori pemerintah maupun tidak.

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* yaitu:

> "Hubungan Internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok, maupun perorangan resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain" (1993: 3).

Dengan adanya berbagai interaksi dalam dunia internasional membuat negara harus saling berlomba dan berpartisipasi dalam dunia internasional. Hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi berbagai aktor yang berpartisipasi di dalam poltik internasional termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, entinitas subnasional seperti birokrasi, pemerintah lokal dan individu. Hubungan internasional merupakan studi tentang tingkah laku dari aktor-aktor tersebut ketika berpartisipasi baik sendiri-sendiri dan bersama-sama dalam proses politik internasional (Mingst, 1999:2).

Hubungan internasional tercipta dari sebuah interaksi yang terfokus pada masalah ekonomi dan perdagangan, lingkungan, energi, serta permasalahan sosial budaya (Perwita dan Yani, 2005:128

2.2 Politik Internasional

K.J Holsti mengadakan perbedaan antara politik internasional dengan kebijakan luar negeri. Kita dapat belajar mengenai keduanya dengan berfokus pada tindakan-tindakan dan tingkah laku dari statesmen secara individual . Ini merupakan pendekatan yang biasa digunakan oleh sejarahwan diplomatik,

berdasarkan pada pernyataan bahwa negara-negara bertingkah laku, kita dapat benar-benar memaknai bahwa para pembuat kebijakan memiliki tujuan-tujuan tertentu, memilih diantara tindakan, dan menggunakan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut atas nama negara. Tingkat analisis ini berfokus pada ideologi-ideologi, motivasi, persepsi, nilai-nilai, ataupun idiosinkretik dari mereka yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan di dalam negara.

Holsti membedakan politik internasional dengan studi kebijakan luar negeri. Pada titik apa kebijakan luar negeri dapat menjadi politik internasional? Pembedaan antara terminologi tersebut menjadi lebih nyata , akan tetapi secara kasar pembedaan antara obyektif dan tindakan (keputusan dan kebijakan) dari sebuah sebuah negara atau negara-negara dan interaksi antara dua atau lebih negara-negara.

Penstudi yang menganalisa tindakan sebuah negara terhadap lingkungan eksternal dan kondisinya-biasanya domestik- di bawah tindakan-tindakan tersebut adalah terformulasikan dan berfokus pada esensi dari kebijakan luar negeri; orang yang menyusun tindakan-tindakan tersebut sebagai satu-satunya aspek dari sebuah pola tindakan dari satu negara dan reaksi atau respon dari yang lain melihat pada tataran politik internasional atau proses interaksi antara dua atau lebih negara-negara.

Dalam kajian politik internasional, perkembangan dan bahkan perubahan yang terjadi di lingkungan internasional merupakan faktor signifikan yang harus diperhatikan oleh negara-negara, sehingga terdapat hubungan yang korelasional

yang akan menghasilkan keputusan dan perilaku politik luar negeri yang bersifat adaptif terhadap lingkungannya (Holsti,1995:17-19)

Politik Internasional mencangkup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional pada tingkat pemerintah sebagai struktur, "Politik Internasional" merangkum atau terdiri atas elemen-elemen sistem internasional seperti multipolaritas atau bipolaritas, dan organisasi internasional. (Kusumohamidjodjo, 1997:11).

Politik internasional merupakan suatu tindakan negara atau beberapa negara yang ditujukan pada suatu negara atau negara-negara lainnya dan sifatnya lebih ditekankan pada soal-soal poltik masyarakat internasional yang lahir sebagai reaksi dari politik luar negeri negara-negara tersebut (Dahlan, 1991:7).

Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkup internal semakin meningkatkan tuntutannya berkenaan dengan kondisi di lingkungan eksternal, atau ketika perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman bagi keberadaan negara bangsa tersebut. Akhirnya kondisi tekanan dari kedua lingkungan tersebut diproses di dalam benak para pembuat keputusan yang bertindak untuk meminimalkan resiko dan memaksimalkan peluang-peluang didasarkan pada persepsi para pembuat keputusan mengenai kondisi lingkungan di sekitar mereka. (Perwita: 68).

Searah dengan perwita, lentner mendefinisikan Politik Internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, dan interplay antar aktor dalam lingkungannya (Lentner, 1974:2).

Politik internasional dan hubungan internasional secara istilah dan pengertian itu sama, tetapi secara teoritis terdapat pebedaan. Politik internasional membahas tentang keadaan soal-soal politik ini di masyarakat internasional dalam arti yang sempit yaitu dengan berpokok atau bertitik tolak pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Sedangkan hubungan internasional adalah suatu istilah yang mencakup totalitas hubungan-hubungan dikalangan bangsa-bangsa dan kelompok dalam masyarakat dunia (Wiraatmadja, 1970:33).

Politik internasional adalah disiplin akademisi yang berbeda dari sejarah yang belum lama dan kejadian-kejadian terbaru. Politik internasional sebagaimana halnya poltik pada umumnya adalah perebutan kekuasaan. Politik internasional sendiri tidak dapat diubah menjadi ketentuan-ketentuan tersebut melalui perantara lembaga-lembaga tersebut (Morgenthau, 1990:25-26).

2.3 Lingkungan Hidup

2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Dalam lingkungan hidup terdapat suatu ekosistem yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pengertian lingkungan hidup lainnya menurut NHT Siahaan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia beserta mahluk hidup lainnya. Sedangkan pengertian lingkungan hidup menurut Otto Soemarwoto dalam bukunya *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, yaitu: Lingkungan Hidup merupakan ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda tak-hidup lainnya. Makhluk hidup tidak berdiri sendiri dalam proses kehidupannya melainkan berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya (Soemarwoto ,1991:48).

Secara ekologis, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Komponen yang berada disekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang (Suratmo,2004:24).

Kelangsungan hidup manusia tergantung dari keutuhan lingkungannya. Sebaiknya keutuhan lingkungan hidup tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Oleh karena itu lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta daya dukung kehidupan yang dieksploitasi , tetapi juga sebagai sumber tempat hidup yang menyaratkan adanya keseimbangan dan keserasian antara manusia dengan lingkungan hidup (Soemarwoto,1992:1-2).

Kesadaran pula bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat saat ini bukan menjadikan sumber daya alam bukan lagi merupakan satu-satunya penentu tingkat kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Namun, bagaimanapun juga sumber daya alam tetap menjadi modal dasar bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Teknologi berfungsi sebagai alat pengolah sumber daya alam yang akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut.

Kehidupan manusia beserta segala aktivitasnya memerlukan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan alam atau ekosistem alamiah dalam menyediakan sumber daya alam, dan jasa-jasa lingkungan tersebut bersifat terbatas. Disamping itu bagi perkembangan teknologi yang semakin canggih dewasa ini, sumber daya alam dapat habis dalam beberapa puluh tahun saja karena laju penggunaannya yang melampaui kapasitas pemulihan sumber daya alam secara alami.

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya, terutama hutan-hutannya yang sangat luas dan lebat. Pengertian sumber daya alam menurut

Gunarwan Suratmo dalam bukunya *Analisis mengenai dampak lingkungan* adalah: "Sumber Daya Alam adalah segala sesuatu di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang telah digunakan masa kini atau yang akan digunakan di masa yang akan datang".

2.3.2 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup dalam Hubungan Internasional

Dengan berakhirnya Perang Dingin, telah mendorong isu-isu lingkungan mengemuka dalam agenda internasional. Bersamaan dengan berkurangnya hirauan terhadap isu-isu mengenai keamanan dan militer yang sangat mengemuka pada saat Perang Dingin berlangsung, perhatian terhadap isu-isu lingkungan hidup terus meningkat. Dimensi global dengan masalah-masalah lingkungan hidup sebenarnya sudah bisa dilihat sejak dulu, misalnya polusi industri-industri yang melampaui batas, penurunan kualitas sungai atau polisi laut yang menjadi batas antar negara. Namun skala dan kualitas permasalahan tersebut meningkat secara drastic sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, laju industrilisasi yang sangat cepat dan penggunaan bahan bakar yang meningkat (Miller,1995:1-4).

Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup begitu meluas dan terasa sangatlah penting sehingga melibatkan bermacam-macam aktor dan isu lainnya dalam arena internasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat dunia pada umumnya dan elit politik di banyak negara, khusunya yang berhubungan dengan kenyataan bahwa persoalan penurunan kualitas lingkungan hidup ini sudah menyentuh kehidupan sehari-hari, seperti memanasnya suhu bumi dan meningkatnya jenis dan kualitas penyakit akibat

penipisan lapisan ozon. Adapun faktor lain yang menyebabkan isu ini begitu meluas adalah gencarnya kampanye yang dilakukan terutama oleh negara-negara Barat melalui media massa, bidang keilmuan, teknologi dan jalur-jalur lainnya (Mas'oed & Arfani, 1992:50).

2.4 Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development)*

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat,dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama(ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.

Pembangunan berkelajutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu , pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan, yakni Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Sosial, dan

Perlindungan Lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Skema pembangunan berkelanjutan pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa "..keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual , emosional, moral dan spiritual". Dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan pembangunan . Hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi inovatif dan kewirausahaan.

Divisi PBB untuk pembangunan berkelanjutan mendaftar beberapa lingkup berikut ini sebagai bagian dari Pembangunan Berkelanjutan :

- Pertanian
- Atmosfir
- Keanekaragaman hayati
- Bioteknologi

- Pengembangan kapasitas
- Perubahan iklim
- Pola Konsumsi dan Produksi
- Demografi
- Penggurunan dan kekeringan
- Pengurangan dan Manajemen Bencana
- Pendidikan dan Kesadaran
- Energi
- Keuangan
- Hutan
- Air segar
- Kesehatan
- Tempat tinggal
- Indikator
- Industri
- Informasi bagi pembuatan Keputusan dan Partisipasi
- Pembuatan keputusan yang terintegrasi
- Hukum Internasional
- Kerjasama Internasional Memberdayakan Lingkungan
- Pengaturan Institusional
- Manajemen Lahan
- Kelompok Besar
- Gunung

- Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional
- Samudera dan laut
- Kemiskinan
- Sanitasi
- Pengetahuan Alam
- Pulau Kecil
- Wisata Berkelanjutan
- Teknologi
- Bahan Kimia Beracun
- Perdagangan dan Lingkungan
- Transport
- Limbah (Beracun)
- Limbah (Radioaktif)
- Limbah (padat)
- Air

2.5 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional dapat didefinisikan sebagai "Kerelaan penyesuaian oleh negara melalui kebijakannya, sehingga mereka mampu mengatur perbedaannya dan mencapai hasil yang menguntungkan bagi keduanya"(Grieco 1990:22). Kerjasama internasional juga merupakan suatu manifestasi kondisi interdefendensi dari masyarakat internasional, yang meliputi bidang-bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.

Menurut Charles A McClelland, kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor dalam rangka merespon dan mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lainnya.

Kerjasma internasional dalam menangani masalah isu lingkungan hidup global diarahkan untuk mencari kesepakatan ukuran-ukuran, patokan-patokan dan norma-norma internasional yang sah serta cara penerapannya. Pembuatan patokan, ukuran dan norma standar ini dibutuhkan untuk mendefinisikan prinsip umum penanganan kolektif dan membuat aturan beserta proses yang tepat pembentukan rezim internasional, dalam dimensi lingkungan hidup.

Dalam suatu kerjasama internasional terkandung suatu interaksi ,interelasi dan interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara keompok dan kelompok, atau pada suatu kesatuan unit dalam sistem internasional dan masyarakat internasional. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyesuaian perilaku oleh para aktor dalam rangka respon yang secara nyata diadakan, atau karena masing-masing pihak sudah saling mengerti sehingga tidak diperlukan lagi suatu perundingan .

Kerjasama international berlangsung dalam tiga tahapan, yaitu :

1. Setelah masalah diidentifikasi, langkah-langkah penjembatanan atau *ad holic* diambil oleh negara-negara yang paling berkenaan dengan masalah tersebut.
2. Bila langkah-langkah tidak berhasil atau sangat terbatas, negara kemudian membentuk suatu organisasi internasional.

3. Bila permasalahannya menjadi terlalu rumit dan ada kecenderungan melibatkan banyak organisasi internasional, muncul usaha untuk mengkoordinasikan organisasi-organisasi internasional tersebut.

   Menurut Coplin, ketiga tahap tersebut masing-masing sangatlah berkaitan(Coplin, 1974:364).

Kerjasama bisa timbul dari suatu komitmen terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha untuk memenuhi kepentingannya . Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pihak yang bekerjasama percaya bahwa yang lainnya akan mematuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam kerjsama. Isu utama dari konsep kerjasama adalah pemenuhan kebutuhan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan diperoleh melalui kerjasama daripada berusaha memenuhi kepentingannya dengan berusaha sendiri. (Dougherty dan Pfaltzgraff,1997:418-419).

Kemungkinan dari adanya suatu kerjasama adalah suatu fakta bahwa mereka akan bertemu lagi. Kemungkinan ini berarti pilihan yang tidak hanya menjelaskan hasil dari pergerakan ini, tetapi juga pengaruh dikemudian hari bagi aktor. Masa depan kemungkinan menjadi bayangan yang kembali dari hari ini dan berdampak pada situasi strateginya. Penegakan situasi yang strategi adalah untuk menerima keuntungan dan kemungkinan dari masa depan dan bereaksi dan antisipasi terhadap adaptasi sikap, yaitu kerjasama (Axelford, 1984;p.12).

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama

yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Dengan kata lain kerjasama dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa membentuk suatu kerjasam internasional.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Mas'oed mengenai Kerjasama Internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Merupakan suatu proses dimana antar negara-negara yang berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lainnya.
2. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut.
3. Mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu.
4. Mengadakan perundingan atau perjanjian diantara kedua belah pihak (Mas'oed, 1997:33).

Berdasarkan pernyataan dari Mas'oed diatas, dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan politik luar negeri tidak mungkin dicapai jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Maka dari itu suatu kerjasama akan diusahakan untuk memperoleh manfaat yang diperkirakan akan memberikan manfaat besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang ditanggungnya.

Suatu kerjasama diawali dengan adanya suatu kesepakatan dan yang paling mudah apabila tidak mengandung banyak resiko. Sebagaimana yang diungkapkan olh Frankle bahwa masalah kerjasama terletak pada pencapaian tujuan.

Kerjasama internasional itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yaitu:

1. Kerjasama Global, dasar utama dari kerjasma ini adalah adanya hasrat yang kuat dari berbagai bangsa di dunia untuk bersatu dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan cita-cita bersama. Contoh bentuk representasi dari kerjasama global ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memungkinkan terbentuknya konvensi-konvensi internasional.
2. Kerjasama Regional, Indikator yang dapat menentukan kerjasama ini terwujud adalah secara geografis letaknya berdekatan, adanya kesamaan pandangan di bidang politik dan kebudayaan maupun perbedaan struktur produktivitas ekonomi.
3. Kerjasama Fungsional, kerjasama ini adalah suatu fokus yang terkonsentrasi, misalnya kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan lain-lain. Kerjasama ini berangkat dari pemikiran yang mensyaratkan adannya kemampuan tertentu pada masing-masing partner kerjasama. Dalam artian kerjasama ini tidak akan terlaksana apabila diantara mitra kerjasama ada yang tidak

mampu mendukung suatu fungsi yang spesifik diharapkan darinya oleh yang lain.

4. Kerjasama ideologi, menurut Vilfredo Pareto adalah suatu kelompok kepentingan untuk membenarkan suatu tujuan dan perjuangan kekuasaan. Misal: organisasi Konfrensi Partai Komunis Sedunia (Darmayadi,2004:1-2)

2.5.1 Kerjasama Trilateral

Kerjsama trilateral adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh tiga Negara dalam suatu bidang tertentu, dalam hal ini adalah kerjasama yang terjalin antara Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam yang bertujuan untuk memberikan dukungan, masukan dan sebagainya mengenai penanganan masalah kerusakan hutan yang terjadi di kawasan Borneo khususnya dalam penelitian ini wiayah perbatasan Kalimantan Timur .

Suatu Negara memutuskan untuk bekerjasama dengan Negara lain karena disebabkan oleh adanya motivasi tertentu dari negara yang bersangkutan . Sebagaimana diungkapkan oleh Peter A. Toma dan Robert F. Gorman dalam bukunya *Understanding Global Issue*, mendapatkan motivasi-motivasi yang membuat suatu negara berhasrat untuk bekerjasama dengan negara lain seperti adanya kepentingan untuk: memperkuat kepentingan nasional, memelihara perdamaian, mendorong kemakmuran ekonomi, dan untuk menangani dampak negative yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran lingkungan (Toma dan Gorman, 1991:385-386).

2.5.2 Fungsi Kerjasama Internasional tentang Lingkungan Hidup

Kerjasama internasional mendorong pemerintah untuk membentuk kesepakatan atau peraturan yang dianggap dapat menjawab masalah lingkungan hidup. Melalui kerjasama internasional, dapat dihasilkan berbagai kesepakatan atau aturan-aturan yang dapat diwujudkan dalam bentuk rezim. Pengejaran akan kekuasaan,jabatan, dan kesejahteraan jarang luput dari pertimbangan masyarakat internasional. Hal ini seringkali diabaikan dalam diskusi-diskusi yang membahas masalah lingkungan internasional, meskipun banyak pertemuan internasional yang besar maupun pertemuan yang kecil berjuang untuk keuntungan pihak nasional maupun organisasi yang terlibat di dalamnya.

Berikut adalah fungsi dari kerjasama internasional mengenai lingkungan hidup menurut Vogler dalam buku *The Globalization of World Politics* :

1. Pembentukan norma-norma

Perkembangan hukum lingkungan internasional dalam norma-norma yang berkaitan telah menjadi hal yang inovatif dalam menghadapi masalah lingkungan dimana beberapa norma menjadi hal yang dipergunakan dalam diskusi-diskusi internasional terkait masalah lingkungan. Prinsip-prinsip pencegahan yang dihasilkan menjadi hal yang mengalami peningkatan dalam pengumpulan prinsip tersebut tetapi tidak dalam peredarannya. *UN Earth Summit* menempati bagian yang sangat penting dalam proses penghasilan norma-norma tentang lingkungan hidup. Pada konferensi Stockholm pada tahun 1972 telah dihasilkan ‘Priciple 21’, yang mengkombinasikan kedaulatan negara mengenai sumber daya nasional dengan kewajiban negara dalam menangani polusi eksternal yang dihasilkan. Pada

tahun 1992 pada kegiatan Rio Earth Summit dihasilkan ‘Agenda 21’ yang menghasilkan 40 bab dokumen dalam 400 halaman dalam kurun waktu dua tahun untuk melakukan negosiasi demi tercapainya dokumen tersebut. Agenda 21 kemudian menjadi norma yang dipakai oleh banyak pihak dalam kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. Norma ini juga dinyatakan sebagai hasil terbaik norma lingkungan internasional yang menghasilkan dampak yang luas dan mengingatkan banyak hal penting terkait lingkungan.

2. Pengembangan Kapasitas

Saat ini tentang lingkungan pada umumnya memiliki tujuan untuk mengembangkan kapasitas melalui perjanjian yang membahas mengenai banyak hal seperti transfer dana, teknologi, dan keahlian, karena pada umumnya negara mengalami kekurangan pihak yang dapat diikut serta berpartisipasi penuh dalam perjanjian internasional . Dalam penanganan masalah tertentu seperti masalah penipisan ozon dan perubahan iklim, perjalanan rezim yang mungkin dihasilkan untuk menangani masalah tersebut tidak dapat berjalan lancer tanpa benar-benar menyediakan fungsinya dalam pengembangan kapasitas setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian atau rezim tersebut.

3. Pemahaman Ilmiah

Kerjasama internasional berdasar pada tahap diskusi mengenai pemahaman ilmiah. Hal ini kemudian diikutsertakan dalam berbagai pertemuan internasional. Pemahaman ilmiah tersebut mencakup mekanisme untuk membangun dan berbagi data saintifik yang baru, termasuk langkah-langkah yang diambil dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian tersebut. Di dalam perjanjian

atau rezim internasional tentang lingkungan hidup dibangun komite saintifik dan badan-badan pembantu yang dapat memdukung efektifitas perjanjian atau rezim tersebut dalam ruang lingkup dari perjanjian atau rezim tersebut.

4. Mengatur Kepemilikan bersama

Hal-hal yang mendapat predikat sebagai kepemilikan bersama secara global merupakan hal-hal yang tidak diatur di dalam hokum kedaulatan tertentu. Hal ini menandakan hal-hal yang menjadi kepemilikan bersama tidak dimiliki oleh satu pihak tertentu. Jika suatu sumber daya tertentu menjadi kepemilikan suatu negara yang jelas maka sudah menjadi tanggung jawab negara tersebut dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya tersebut, tetapi untuk hal-hal yang menjadi kepemilikan bersama tidaklah mungkin solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut ditangani oleh satu pihak tertentu misalnya satu negara saja karena masalah tersebut bersifat global yang menandakan ada banyak pihak yang terlibat didalamnya .

Dalam hal ini, kerjasama internasional berfungsi untuk menyediakan substitusi dari pemerintah yang mencakup seluruh dunia seutuhnya. Dengan adanya kerjasama internasional maka dapat dilakukan pengawasan terhadap penggunaan sumber daya milik bersama yang akan menghindari terjadinya penyelewengan penggunaan sumber daya tersebut. Dalam kerjasama tersebut terjadi interaksi dari berbagai negara baik negara maju dan negara berkembang. Dukungan internasional dapat menggerakan setiap pihak yang terlibat didalamnya sekaligus menjadi penggerak bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi di dalam kerjasama tersebut (John Vogler. Op.cit.2008.Hal 356-360)

Pertemuan-pertemuan internasional dilandasi oleh berbagai tujuan politik yang ingin dicapai terkait masalah lingkungan hidup. Hal ini dapat terjadi oleh karena pihak-pihak yang terlibat didalamnya terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Akan tetapi hal tersebut menjadi kunci utama dari fungsi kerjasama internasional dalam lingkungan hidup, yaitu adanya regulasi yang melewati batas wilayah di seluruh dunia sehingga regulasi tersebut dapat digunakan di berbagai wilayah. Kerjasama Internasional berperan sangat penting dalam penyebaran norma-norma yang telah disepakati bersama yang akan membantu setiap pihak yang terlibat sehingga penyebaran norma tersebut akan mendukung dalam perlindungan sumber daya yang menjadi milik bersama.

2.6 Politik Luar Negeri

Dalam suatu proses politik internasional yang melibatkan hubungan antar actor negara dan non-negara didalamnya, dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh aktor-aktor tersebut sebagai representasi dari kepentingan masing-masing aktor yang kemudian saling bertemu. Dalam hubungan internasional khususnya hubungan antar negara hal ini disebut Politik Luar Negeri. Hal ini merupakan studi kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek internasional tapi juga aspek-aspek eksternal suatu negara (Roseneau, 1976:15).

Pengertian dasar dari Politik Luar Negeri adalah *'action theory'*, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri *(foreign policy)* merupakan

suatu perangkat formula nilai,sikap,arah,serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional, melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat oleh para pengambil keputusan yang disebut Kebijakan Luar Negeri (Perwita & Yani, 2005:47-48).

K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara, yaitu:

1. Nilai *(Values)* yang menjadi tujuan para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain. (Perwita & Yani,2005:51-52)

Selain itu menurut Holsti, paling sedikit ada empat kondisi atau variable yang mampu menopang pertimbangan elit pemerintah dalam pemilihan strategi politik luar negeri, yaitu:

1. Struktur sistem internasional, yaitu suatu kondisi yang didalamnya terdapat pola-pola dominasi, sub ordinasi, dan kepemimpinan.
2. Strategi umum politik luar negeri berkaitan erat dengan sifat kebutuhan sosial-ekonomi domestik dan sikap domestik.
3. Persepsi elit pemerintah (pembuat UU) terhadap tingkat ancaman eksternal.

4. Lokasi geografis, karakteristik, topografis, dan kandungan sumber daya alam yang dimiliki negara (Holsti,1987:133-134).

2.7 Konsep Pengaruh

Ketika kita berbicara mengenai suatu hubungan internasional dan interaksi antar negara di dalamnya, maka secara langsung maupun tidak langsung kita akan berbicara mengenai konsep pengaruh.

> "Pengaruh adalah sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan.(Holsti, dalam Perwita dan Yani 2005:31). Kegiatan saling mempengaruhi, misalnya dapat terjadi dalam aspek kehidupan manusia diantaranya aspek ekonomi dan aspek politik, begitu pula sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa dinamika Hubungan Internasional merupakan fungsi interaksi timbal balik antara aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik".(Perwita dan Yani, 2005:33).

Sedangkan menurut Alvin Z. Rubenstein dalam bukunya *Soviet and Chinese Influense In The Third World*, berpendapat bahwa:

> "Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya, dalam hal ini syaratnya adalah bahwa terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil.(Rubenstein, 1967:3-6).

Menurut Rubenstein konsep dari suatu pengaruh itu sendiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Hal yang dipengaruhi
2. Perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri atau dalam negeri.

3. Asumsi, kriteria,dan data yang penting dalam menganalisis hal yang dipengaruhi dan perubahan dalam kebijakan dalam dan luar negeri.

Lingkungan eksternal dan internal memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya, dalam hal ini syaratnya adalah terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat antara sumber dengan hasil (Rubenstein,1976:3-6).

Lebih lanjut Perwita dan Yani mengutip pendapat Rubenstein mengenai salah satu asumsi dasar konsep pengaruh,

> "Sistem yang biasa dipakai untuk menentukan pengaruh dengan menggunakan variabel yang ada diantara negara-negara. Yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama.

Menurut pendapat K.J Holsti dalam bukunya *Politik Internasional suatu kerangka Analisis* menjelaskan mengenai Konsep Pengaruh yaitu

"Sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep Pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan. (Holsti,1988:159).

Menurut T. May Rudi, Pengaruh sendiri dapat dianalisis kedalam empat macam bentuk:

1. Pengaruh sebagai aspek kekuasaan, pada hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan.
2. Pengaruh sebagai sumber daya yang digunakan dalam tindakan terhadap pihak lain melalui cara-cara persuasif, sampai koersif dengan maksud mendesak untuk mengikuti kehendak yang memberikan pengaruh.

3. Pengaruh sebagai salah satu proses dalam rangka hubungan antara satu sama lainnya (Individu, kelompok, organisasi, dan negara).
4. Besar-kecilnya pengaruh ditinjau secara relatif dengan membandingkan melalui segi kuantitas (besar kecilnya keuntungan atau kerugian).

Besar kecilnya kekuasaan sangat menentukan besar kecilnya suatu pengaruh, bentuk pengaruh ini dapat berubah:

a) Mengarahkan atau mengendalikan untuk melakukan sesuatu.
b) Mengarahkan atau mengendalikan untuk tidak melakukan sesuatu.(Rudi, 1993:24-25).

Menurut Rubbenstein yang dikutip Perwita dan Yani menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dasar konsep pengaruh, yaitu:

1. Secara operasional konsep pengaruh digunakan secara terbatas dan spesifik mungkin dalam konteks transaksi diplomatik.
2. Sebagai konsep multidimensi, konsep pengaruh lebih dapat diidentifikasikan daripada diukur oleh beberapa kebenaran (proposisi). Sejumlah konsep pengaruh dapat diidentifikasikan hanya sedikit, dikarenakan tingkah laku B yang dapat mempengaruhi A terbatas.
3. Jika pengaruh A terhadap B besar, akan mengancam sistem politik domestik B, termasuk sikap,perilaku domestik dan institusi B.
4. Pengetahuan yang dalam mengenai politik domestic B sangat penting untuk mempelajari hubungan kebijakan luar negeri antara A dan B dikarenakan pengaruh tersebut akan dimanifestasikan secara kongkret dalam konteks isu area tertentu dari B.

5. Pada saat seluruh pengaruh dari suatu negara dikompromikan dengan kedaulatan negara lain secara menyeluruh dan kadang-kadang dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan pemerintah dari negara yang dipengaruhi, terdapat batasan dimana pengaruh tersebut tidak berpengaruh terhadap suatu negara atau pemimpin negara tersebut. Pemerintah B tidak akan memberi konsesi-konsesi terhadap A yang dapat melemahkan kekuatan politik domestik kecuali bila A menggunakan kekuatan militer terhadap B.
6. Negara donor berpengaruh terhadap negara lain melalui bantuan-bantuan yang diberikannya, tidak hanya karena adanya rasa timbal balik dari B kepada A, akan tetapi juga reaksi dari C, D, E, F,.....yang dapat berpengaruh terhadap hubungan A dan B.
7. Data-data yang relevan untuk mengevaluasi pengaruh dari lima kategori yaitu: (1) ukuran perubahan konsepsi dan tingkah laku, (2) ukuran interaksi yang dilakukan secara langsung (kuantitas dan kumpulan data),(3) ukuran dari pengaruh yang ditujukan,(4) studi kasus, dan (5) faktor perilaku idiosinkratik.
8. Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan pengaruh adalah dengan menggunakan variabel yang ada diantara negara-negara, yang paling baik adalah model yang dapat digunakan untuk tipe masyarakat dengan area geografis dan budaya yang sama.(Perwita dan Yani,2005:31-33).

Sedangkan menurut Daniel S. Paap dalam bukunya yang berjudul *"Contemporary International relation: A Frame Work for Understanding ",* mendefinisikan kekuatan pengaruh sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan untuk menentukan hasil yang keluar. Konsep pengaruh itu sendiri merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan (Perwita & Yani, 2005:31).